
ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA BELANJA DAERAH KOTA KEDIRI

Linawati¹ dan Mar'atus Sholikhah²

¹Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri
email: linawati@unpkediri.ac.id , linasolmas1@gmail.com

²Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri
email: sholikhah@unpkediri.ac.id

ABSTRAK

Otonomi daerah menuntut adanya kemandirian pada pemerintah daerah. Tingkat kemandirian tersebut diwujudkan dengan tidak tergantungnya pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam memenuhi pengeluarannya. Adanya transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi yang banyak terjadi adalah transfer dari pemerintah pusat tidak meningkatkan PAD, tetapi dipergunakan untuk membiayai belanja daerah. Fenomena tersebut disebut sebagai flypaper effect. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada atau tidak flypaper effect pada belanja daerah di Kota Kediri. Pendekatan dan teknik penelitian adalah kuantitatif deskriptif. Data penelitian adalah data laporan realisasi anggaran tahun 2009-2018, berupa data realisasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja daerah. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, dengan bantuan SPSS for windows versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi flypaper effect pada belanja daerah di Kota Kediri pada tahun 2009-2018. Kemandirian daerah belum sepenuhnya dapat terwujud, pemerintah Kota Kediri masih perlu melakukan upaya untuk menggali potensi penerimaan PAD untuk memenuhi belanja daerahnya, dengan tidak mengandalkan transfer dari pemerintah pusat.

Kata Kunci: Belanja Daerah, PAD, DAU, flypaper effect

Pendahuluan

Dengan adanya undang-undang otonomi daerah, yaitu Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka daerah mempunyai kewajiban untuk mengendalikan daerahnya secara mandiri sesuai dengan aturan dan undang –undang yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah (otoda), maka kemandirian daerah terus dipacu, agar daerah tidak mengantungkan kelangsungan hidup daerahnya pada pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi pemerintah daerah harus mampu mengembangkan daerahnya dengan optimal. Hal itu dapat dilakukan dengan menggali dan meningkatkan potensi daerah yang dapat menjadi sumber – sumber pendapatan daerah. Sumber utama penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari pemungutan daerah berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan (Nabilah, dkk. 2016). PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah. Pemerintah daerah harus menggali sumber-sumber penerimaan daerahnya secara optimal dengan melihat potensi daerah yang dimiliki. Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk menggali pendanaan dari daerah dalam pelaksanaan otoda sebagai wujud dari azas desentralisasi.

Dengan adanya otoda bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan pada keberlangsungan hidup daerah. Pemerintah pusat tetap berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perkembangan daerah, walaupun perannya mulai berkurang. Pemerintah tetap memberikan bantuan dana transfer kepada pemerintah daerah. Dana transfer tersebut dapat berwujud Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH). Dana transfer tersebut diperuntukkan guna meningkatkan pemerataan daerah, mengurangi dan atau menghilangkan kesenjangan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya. Serta terjamin tercapainya standar minimum pelayanan publik di semua daerah (Yasir, 2017).

Salah satu dana transfer yang semua daerah mendapatkan adalah DAU. Menurut Wahyuni dan Supheni (2017) DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan belanjanya. DAU dipergunakan untuk menutup kebutuhan daerah yang melebihi dari potensi penerimaan daerah. Penggunaan DAU diprioritaskan untuk belanja yang dapat meningkatkan potensi daerah, sehingga memacu meningkatkan PAD.

Dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah juga diberikan wewenang untuk mengatur pengeluaran dan membelanjakannya untuk kepentingan kemajuan daerah. Menurut Nabilah, dkk (2016) belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam satu periode anggaran. Dalam melaksanakan belanja daerah, pemerintah daerah harus melakukan belanja yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan mempertimbangkan ketersediaan dana di daerah, serta sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Dana yang dipergunakan untuk belanja daerah dapat berasal dari PAD maupun dana transfer dari pemerintah pusat.

Dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, fenomena di lapangan yang banyak terjadi adalah banyak pemerintah daerah yang akhirnya menggantungkan adanya dana transfer untuk membiayai kebutuhan belanja daerahnya. Hal ini tentunya menyimpang dari tujuan diberikannya dana transfer tersebut. Seperti yang dikemukakan Kuncoro (2007), bahwa pemerintah daerah cenderung berhati-hati untuk membelanjakan dananya yang berasal dari masyarakat dengan wujud PAD daripada dana yang berasal dari pemerintah pusat berupa dana transfer. Pemerintah daerah memberikan respon lebih tinggi pada pembelanjanya yang bersumber dari dana transfer, daripada yang bersumber dari PAD. Menurut Halim (2017), ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap dana transfer (DAU) daripada pendapatan sendiri (PAD), hal tersebut dinamakan *flypaper effect*. Fenomena *flypaper effect* berimplikasi bahwa transfer dari pemerintah pusat akan meningkatkan belanja daerah menjadi lebih besar dari pada penerimaan dana transfer itu sendiri (Kuncoro, 2007). Lebih lanjut dijelaskan *flypaper effect* dapat terjadi dengan peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja daerah yang berlebihan, serta adanya elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi dari pada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

Kota Kediri, merupakan salah satu kota di Propinsi Jawa Timur yang memiliki potensi daerah yang baik. Kota Kediri merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur dari segi kepadatan penduduk. Banyaknya obyek-obyek wisata, restoran, perusahaan industri dan UMKM di Kota Kediri menjadi dasar potensi penerimaan daerah yang baik. Sama halnya dengan pemerintah daerah yang lain, pemerintah Kota Kediri juga harus melakukan pengelolaan keuangannya, harus menjaga keseimbangan penerimaan dan pengeluarannya. Fenomena yang ada, dari tahun ke tahun PAD Kota Kediri mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Kediri juga menerima DAU dari pemerintah pusat. Penerimaan DAU selama ini berkisar 2-3 kali lipat dari PAD Kota Kediri. Dengan jumlah penerimaan DAU yang lebih

besar dibandingkan dengan penerimaan PAD, Pemerintah Kota Kediri memiliki kecenderungan belanja daerahnya banyak didanai dari DAU.

Fenomena *flypaper effect* masih menarik untuk dijadikan obyek kajian penelitian, karena masing-masing daerah mempunyai tingkat pengelolaan keuangan yang berbeda – beda, dan potensi daerah satu dengan yang lainnya pun juga tidak sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja daerah di Kota Kediri pada Tahun 2009-2018, serta apakah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerahnya.

Hipotesis penelitian dituliskan sebagai berikut:

- H₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Kediri tahun 2009-2018.
- H₂ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Kediri tahun 2009-2018.
- H₃ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Kediri tahun 2009-2018.
- H₄ : Terjadi *Flypaper Effect* pada belanja daerah di Kota Kediri tahun 2009-2018.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik deskriptif, hal ini dikarenakan data – data penelitian berupa angka-angka yang diolah menggunakan statistik dan hasilnya dideskripsikan. Penelitian terdiri dari tiga variabel, yaitu Belanja Daerah (Y), Pendapatan Asli Daerah (X₁) dan Dana Alokasi Umum (X₂). Data –data penelitian merupakan data sekunder berupa realisasi Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Kediri yang didapatkan dari www.dpjg.go.id. Subyek penelitian merupakan pemerintah daerah Kota Kediri dengan tahun pengamatan 2009 sampai dengan 2018.

Hipotesis penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS for windows 23. Sebelum melakukan analisis regresi terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas.

Pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis 1 sampai dengan 3, dilihat dari nilai signifikansi dengan derajat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$), jika probabilitas $< 0,05$ maka hipotesis (H_a) diterima, dan sebaliknya. Pengambilan keputusan pada hipotesis keempat,

terjadi atau tidaknya *flypaper effect* yaitu dengan melihat nilai koefisien PAD dan DAU. Terjadi *flypaper effect* jika (1) koefisien DAU lebih besar dari PAD, atau (2) PAD tidak signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, terlebih dahulu harus dilakukan uji prasyarat atau uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas data, uji multikolinearitas data, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi, variabel pengganggu berdistribusi normal. Uji normalitas data dalam penelitian menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov Test*. Berikut hasil pengujian normalitas data.

	Unstandardized Residual
Statistic	,
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas data

Sumber: data diolah 2019

Berdasarkan tabel 1 di atas, hasil pengujian normalitas data menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*, menunjukkan hasil dengan nilai 0,200 Asymp. Sig. (2-tailed), menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi normal.

Pengujian asumsi klasik yang kedua adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah antar variabel independen terdapat korelasi. Model regresi yang baik antar variabel independen tidak ada korelasi. Terjadi multikolinearitas atau tidak dalam penelitian ini dilihat dari nilai *tolerance* dan *Varian Inflation Factor (VIF)*. Berikut hasil pengujian multikolinearitas.

Tabel 2. Hasil uji multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
PAD	36	45
DAU	36	45

Sumber: data diolah 2019

Berdasarkan tabel 2 di atas, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel PAD dan DAU, masing-masing mempunyai nilai *tolerance* diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Pengujian asumsi klasik ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser. Pengambilan keputusannya yaitu jika variabel independen terhadap nilai *absolute residual* statistik nilainya lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil pengujian heteroskedastisitas.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig
PAD → BD	0,325
DAU → BD	0.800

Sumber: data diolah 2019

Berdasarkan tabel 3 di atas, hasil uji Glejser menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu PAD dan DAU nilai signifikansinya >0,05, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian asumsi klasik yang keempat adalah uji autokorelasi. Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t sebelumnya. Uji Autokorelasi pada penelitian ini menggunakan Uji *Run Test*. Uji *Run Test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Berikut hasil Uji Autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Unstandardized Residual	
Value ^a	-14498977595,49
Asymp. Sig. (2-tailed)	,707
N of Valid Cases	100
Number of Runs	100

Sumber: data diolah 2019

Berdasarkan tabel 4 di atas, hasil pengujian autokorelasi dengan uji Run Test menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig sebesar 0,707 yang lebih besar dari 0,05 ($0,707 > 0,05$). Artinya tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

Setelah melakukan uji asumsi klasik, maka dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis bertujuan untuk menjawab hipotesis penelitian. Berikut ini hasil pengujian hipotesis.

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh PAD terhadap belanja daerah, dan pengaruh DAU terhadap belanja daerah. Hasil uji secara parsial disajikan pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5
Hasil Uji t (Parsial)

Model	Beta	t	Sig
Constant	1475811725,163	86	57
D	85	53	51
U	74	98	03

Sumber: data diolah 2019

Berdasarkan tabel 6 di atas, persamaan regresi dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 257475811725 + 3,085PAD + 0,374X_2 + e$$

atau

$$BD = 257475811725 + 3,085X_1 + 0,374DAU + e$$

Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah mempunyai nilai signifikansi 0,051 yang lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa PAD tidak signifikan terhadap belanja daerah, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.

Pada Variabel DAU terhadap Belanja Daerah mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,703 juga lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa DAU tidak signifikan terhadap Belanja Daerah, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini di tolak.

Pada nilai signifikansi PAD dan DAU, keduanya sama – sama tidak signifikan. Untuk mengetahui terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah dapat diketahui dari signifikansi PAD. Jika PAD tidak signifikan maka terjadi *flypaper effect*. Berdasarkan pada Uji parsial yang telah dilakukan, diketahui bahwa PAD tidak signifikan terhadap belanja daerah, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah Kota Kediri tahun 2009-2018. Hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima.

Tabel 6

Hasil Uji F (Simultan)

Model	F	Sig
Regression	15,565	0,003
Residual		
Total		

Sumber: data diolah 2019

Berdasarkan tabel 6 di atas, hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 15,565 dengan signifikansi 0,003. Nilai Signifikansi PAD dan DAU kurang dari 0,05, yang berarti PAD dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti

bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima bahwa variabel PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Kediri Tahun 2009-2018.

Tabel 7
 Koefisien Determinasi

Model	R^2	Adjusted R^2	Adjusted R^2 Squared
1	0,904	0,816	0,764

Sumber: data diolah 2019

Berdasarkan tabel 7 di atas, diketahui nilai korelasi determinasi menggunakan *Adjusted R Square* ($Adjusted R^2$) sebesar 0,764. Nilai ini mempunyai arti bahwa variabel PAD dan DAU berkontribusi mempengaruhi Belanja Daerah sebesar 76,4%, dengan sisanya 23,6% belanja daerah dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel independen penelitian yaitu PAD dan DAU.

Pada tabel 8 di bawah ini, disajikan ringkasan pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

Tabel 8. Ringkasan Uji Hipotesis

No.	Hipotesis	Nilai Sig	Keputusan
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Kediri tahun 2009-2018.	0,000	Dolak
2	Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Kediri tahun 2009-2018.	0,000	Dolak
3	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Kediri tahun 2009-2018.	0,000	Diterima
4	Terdapat <i>Flypaper Effect</i> pada belanja daerah di Kota Kediri tahun 2009-2018.	0,000	Diterima

Sumber: data diolah 2019

Pembahasan

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kota Kediri

Penerimaan daerah harus seimbang dengan pengeluaran daerah. Sumber untuk pengeluaran daerah berasal dari PAD dan dana transfer dari pemerintah pusat. Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Kediri. Lebih lanjut hasil analisis data menunjukkan koefisien regresi bernilai positif, yang diartikan bahwa ketika terjadi peningkatan PAD maka belanja daerah juga akan meningkat. Pada kenyataannya, belanja daerah tidak sepenuhnya dibiayai oleh PAD, hal ini mungkin karena PAD yang kecil dan atau tidak cukup untuk membiayai belanja daerah. Dengan PAD yang kecil, dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah kurang maksimal dalam menggali potensi daerahnya sehingga berdampak pada penerimaan PAD.

Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kota Kediri

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk pemerataan ekonomi, agar daerah dapat meningkatkan potensi keuangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Lebih lanjut hasil analisis data menunjukkan koefisien regresi DAU bernilai positif, yang diartikan bahwa ketika terjadi peningkatan PAD maka belanja daerah juga akan meningkat. Hal ini sejalan karena DAU merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah. Dengan meningkatnya penerimaan daerah, maka pengeluaran daerahpun juga akan meningkat. Masih banyaknya sumber penerimaan daerah yang lain seperti DAK dan DBH, maka belanja daerah tidak saja semata-mata didanai oleh PAD dan DAU.

Pendapatan Asli Daerah dan dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kota Kediri secara simultan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kota Kediri tahun 2009-2018. Untuk memenuhi semua kegiatan belanja daerah pemerintah daerah membutuhkan sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah yang utama adalah PAD, tetapi selain itu pemerintah daerah juga mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat, seperti DAU. Peningkatan belanja daerah harus diimbangi pula dengan jumlah peningkatan pendapatan daerah, baik yang berasal dari pendapatan daerah sendiri yaitu PAD, ataupun pendapatan dari pemerintah

pusat berupa dana transfer, seperti DAU. Pemerintah daerah harus menjaga keseimbangan keuangannya baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.

Indikasi Flypaper Effect

Flypaper effect adalah suatu kondisi dimana kecenderungan pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana transfer (DAU) untuk memenuhi belanja daerahnya dari pada menggunakan dana dari pendapatannya sendiri (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah Kota Kediri tahun 2009-2018. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Kediri mempunyai ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui DAU. Terlihat bahwa DAU dari tahun ke tahun semakin meningkat, walaupun PAD Kota Kediri juga meningkat, akan tetapi peningkatan jumlah DAU tidak seimbang dengan PAD. Kondisi keuangan pemerintah Kota Kediri masih belum dapat dikatakan mandiri, sehingga masih membutuhkan DAU yang lebih banyak untuk membiayai belanja daerahnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel PAD dan DAU secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dengan koefisien PAD sebesar 0,051, dan koefisien DAU sebesar 0,703. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Lebih lanjut hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah di Kota Kediri periode 2009 sampai dengan 2018. Hal ini diartikan bahwa DAU yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri dipergunakan untuk membiayai belanja daerahnya dibandingkan untuk meningkatkan penerimaan PAD.

Pemerintah daerah Kota Kediri untuk kedepannya harus lebih memprioritaskan peningkatan penerimaan PAD. Dengan menggali potensi-potensi PAD yang selama ini belum maksimal, misalnya dengan meningkatkan target penerimaan pajak restoran, pajak reklame. Dengan memberikan informasi dan arahan untuk membayar pajak pada mereka yang mempunyai kewajiban pada pajak tersebut di atas. Dengan tingginya PAD maka ketergantungan terhadap DAU lebih kecil, sehingga kemandirian daerah dapat terwujud dengan maksimal. Pada penelitian selanjutnya dapat memperpanjang waktu penelitian dan menambah variabel bebas penelitian seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Daftar Pustaka

- Halim, A. 2017. Manajemen Keuangan Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, H. 2007. Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X, 26-28 Juli 2007, Makasar.
- Nabilah, A.N., A, Soelistyo dan H, Kusuma. 2016. Analisis Flypaper Effect PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 14(2). Online: <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/3894> diunduh pada 2 Maret 2019.
- Wahyuni, S.E. dan I. Supheni. 2017. Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016. Akuntansi Dewantara, 1(2): 188-200.
- Yasir. 2017. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota Malang periode 2011-2016. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 6(2). online <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/326> Diunduh pada 1 April 2019.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
www.djpk.kemenkeu.go.id